



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 40 TAHUN 2019**

TENTANG

**RINCIAN KURANG SALUR ALOKASI DANA DESA,
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA SE-KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2018 PADA TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, telah dianggarkan Kurang Salur Alokasi Dana Desa dan Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa tahun anggaran 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang Rincian Kurang Salur Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa Se-Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Pada Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

RINCIAN KURANG SALUR ALOKASI DANA DESA,
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA SE-KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2018 PADA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, telah dianggarkan Kurang Salur Alokasi Dana Desa dan Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa tahun anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang Rincian Kurang Salur Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa Se-Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Pada Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1955);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 611);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 105);
17. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014, Nomor 43);
18. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 44 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014, Nomor 44);

19. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015, Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, Nomor 23);
20. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN KURANG SALUR ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA SE-KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018 PADA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

3. Kurang Salur Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat Kurang Salur ADD, adalah selisih kurang antara ADD yang dihitung berdasarkan realisasi rampung perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus Tahun 2018 dikurangi realisasi penyaluran ADD Tahun 2018.
4. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten, dari kabupaten ke Desa.
5. Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Kurang Salur DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah selisih kurang antara DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dihitung berdasarkan realisasi rampung penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2018 setelah dikurangi realisasi penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2018.

BAB II

PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN

Pasal 2

- (1) Kurang Salur ADD dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.3.458.536.000,00 (tiga milyar empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (2) Kurang Salur DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.482.191.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (3) Kurang Salur DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Kurang salur DBH Pajak Daerah sebesar Rp.396.099.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
 - b. Kurang salur DBH Retribusi Daerah sebesar Rp.86.092.000,00 (delapan puluh enam juta sembilan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Rincian Kurang Salur ADD untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rincian Kurang Salur DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Penyaluran Kurang Salur ADD, DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan secara sekaligus sesuai dengan pagu Kurang Salur ADD, DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masing-masing Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 25 Oktober 2019

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 25 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,



SUYANTO

Pasal 3

- (1) Rincian Kurang Salur ADD untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rincian Kurang Salur DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Penyaluran Kurang Salur ADD, DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan secara sekaligus sesuai dengan pagu Kurang Salur ADD, DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masing-masing Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 25 Oktober 2019
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 25 Oktober 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M
NIP. 19690112 199903 2 005

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 40 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN KURANG SALUR ALOKASI DANA DESA, BAGI
 HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
 KEPADA DESA SE-KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018
 PADA TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN KURANG SALUR BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
 UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2019

KODE	NAMA KECAMATAN / DESA	DBP PAJAK DAERAH	DBP RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH 5 = 3 + 4	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6
62.01.01	KECAMATAN KUMAI				
62.01.01.2001	Sungai Cabang	3.226.900,00	701.400,00	3.928.300,00	
62.01.01.2002	Teluk Pulau	3.136.400,00	681.700,00	3.818.100,00	
62.01.01.2003	Sabuai	3.699.500,00	804.100,00	4.503.600,00	
62.01.01.2004	Kerava	3.670.300,00	797.700,00	4.468.000,00	
62.01.01.2005	Teluk Bogam	4.092.000,00	889.400,00	4.981.400,00	
62.01.01.2006	Sungai Bakau	4.142.100,00	900.300,00	5.042.400,00	
62.01.01.2007	Kubu	4.319.900,00	938.900,00	5.258.800,00	
62.01.01.2008	Sungai Kapitan	21.289.400,00	4.627.200,00	25.916.600,00	
62.01.01.2009	Batu Belaman	5.044.300,00	1.096.400,00	6.140.700,00	
62.01.01.2010	Sungai Tendang	5.153.800,00	1.120.200,00	6.274.000,00	
62.01.01.2014	Sungai Sekonyer	3.216.700,00	699.100,00	3.915.800,00	
62.01.01.2015	Sungai Bedaun	3.249.600,00	706.300,00	3.955.900,00	
62.01.01.2017	Bumi Harjo	5.320.300,00	1.156.400,00	6.476.700,00	
62.01.01.2032	Pangkalan Satu	5.747.400,00	1.249.200,00	6.996.600,00	
62.01.01.2034	Sabuai Timur	3.323.800,00	722.400,00	4.046.200,00	
	SUB TOTAL	78.632.400,00	17.090.700,00	95.723.100,00	
62.01.02	KECAMATAN ARUT SELATAN				
62.01.02.2001	Tanjung Putri	3.495.200,00	759.700,00	4.254.900,00	
62.01.02.2004	Pasir Panjang	44.619.500,00	9.698.000,00	54.317.500,00	
62.01.02.2010	Rangda	2.934.000,00	637.700,00	3.571.700,00	
62.01.02.2011	Kenambui	3.207.900,00	697.200,00	3.905.100,00	
62.01.02.2012	Runtu	3.443.300,00	748.400,00	4.191.700,00	
62.01.02.2013	Umpang	3.089.600,00	671.500,00	3.761.100,00	
62.01.02.2014	Kumpai Batu Bawah	4.355.300,00	946.600,00	5.301.900,00	
62.01.02.2015	Kumpai Batu Atas	5.108.400,00	1.110.300,00	6.218.700,00	
62.01.02.2016	Natai Raya	4.464.500,00	970.300,00	5.434.800,00	
62.01.02.2017	Medang Sari	6.821.200,00	1.482.600,00	8.303.800,00	
62.01.02.2018	Natai Baru	3.820.500,00	830.400,00	4.650.900,00	
62.01.02.2019	Tanjung Terantang	3.869.000,00	840.900,00	4.709.900,00	
62.01.02.2020	Sulung	5.626.400,00	1.222.900,00	6.849.300,00	
	SUB TOTAL	94.854.800,00	20.616.500,00	115.471.300,00	
62.01.03	KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA				
62.01.03.2001	Babuai Baboti	3.412.200,00	741.600,00	4.153.800,00	
62.01.03.2002	Tempayung	3.443.300,00	748.400,00	4.191.700,00	
62.01.03.2003	Sakabulin	3.491.100,00	758.800,00	4.249.900,00	
62.01.03.2004	Kinjil	3.311.400,00	719.700,00	4.031.100,00	
62.01.03.2005	Dawak	5.287.800,00	1.149.300,00	6.437.100,00	
62.01.03.2006	Riam Durian	4.993.400,00	1.085.300,00	6.078.700,00	
62.01.03.2009	Lalang	3.056.800,00	664.400,00	3.721.200,00	
62.01.03.2010	Rungun	3.785.500,00	822.800,00	4.608.300,00	
62.01.03.2011	Kondang	3.085.500,00	671.300,00	3.756.800,00	
62.01.03.2012	Suka Jaya	4.934.000,00	1.072.400,00	6.006.400,00	
62.01.03.2013	Sukamakmur	4.915.700,00	1.068.400,00	5.984.100,00	
62.01.03.2014	Sumber Mukti	3.970.500,00	863.000,00	4.833.500,00	
62.01.03.2015	Palih Baru	4.605.000,00	1.000.900,00	5.605.900,00	
62.01.03.2016	Ipuh Bangun Jaya	4.270.500,00	928.200,00	5.198.700,00	
62.01.03.2017	Sagu Suka Mulya	4.080.500,00	886.900,00	4.967.400,00	
	SUB TOTAL	60.643.200,00	13.181.400,00	73.824.600,00	
62.01.04	KECAMATAN ARUT UTARA				
62.01.04.2001	Nanga Mua	3.158.400,00	686.500,00	3.844.900,00	
62.01.04.2003	Sukarami	2.934.000,00	637.700,00	3.571.700,00	
62.01.04.2004	Gandis	2.934.000,00	637.700,00	3.571.700,00	
62.01.04.2005	Kerabu	2.934.000,00	637.700,00	3.571.700,00	
62.01.04.2006	Sambi	3.185.600,00	692.400,00	3.878.000,00	
62.01.04.2007	Penyombean	3.205.500,00	696.700,00	3.902.200,00	
62.01.04.2008	Pandau	3.403.500,00	739.800,00	4.143.300,00	
62.01.04.2009	Riam	3.319.000,00	721.400,00	4.040.400,00	
62.01.04.2010	Panahan	3.349.600,00	728.000,00	4.077.600,00	

62.01.04.2011	Sungai Dau	2.934.000,00	637.700,00	3.571.700,00	
	SUB TOTAL	31.357.600,00	6.815.600,00	38.173.200,00	
62.01.05	KECAMATAN PANGKALAN LADA				
62.01.05.2001	Pangkalan Tiga	5.073.800,00	1.102.800,00	6.176.600,00	
62.01.05.2002	Pandu Sanjaya	10.183.600,00	2.213.400,00	12.397.000,00	
62.01.05.2003	Lada Mandala Jaya	5.548.900,00	1.206.000,00	6.754.900,00	
62.01.05.2004	Makarti Jaya	3.701.900,00	804.600,00	4.506.500,00	
62.01.05.2005	Sumber Agung	8.338.300,00	1.812.300,00	10.150.600,00	
62.01.05.2006	Purbasari	5.328.400,00	1.158.100,00	6.486.500,00	
62.01.05.2007	Sungai Rangit Jaya	4.243.500,00	922.300,00	5.165.800,00	
62.01.05.2008	Pangkalan Dewa	3.319.400,00	721.500,00	4.040.900,00	
62.01.05.2009	Kadipi Atas	3.793.200,00	824.500,00	4.617.700,00	
62.01.05.2010	Sungai Melawen	5.847.300,00	1.270.900,00	7.118.200,00	
62.01.05.2011	Pangkalan Durin	6.506.300,00	1.414.100,00	7.920.400,00	
	SUB TOTAL	61.884.600,00	13.450.500,00	75.335.100,00	
62.01.06	KECAMATAN PANGKALAN BANTENG				
62.01.06.2001	Pangkalan Banteng	4.102.300,00	891.600,00	4.993.900,00	
62.01.06.2002	Mulya Jadi	3.088.300,00	671.200,00	3.759.500,00	
62.01.06.2003	Karang Mulya	6.129.500,00	1.332.200,00	7.461.700,00	
62.01.06.2004	Kebun Agung	3.840.200,00	834.700,00	4.674.900,00	
62.01.06.2005	Sidomulyo	4.432.000,00	963.300,00	5.395.300,00	
62.01.06.2006	Marga Mulya	4.325.800,00	940.200,00	5.266.000,00	
62.01.06.2007	Amin Jaya	5.409.500,00	1.175.700,00	6.585.200,00	
62.01.06.2008	Arga Mulya	4.575.700,00	994.500,00	5.570.200,00	
62.01.06.2009	Natai Kerbau	3.916.700,00	851.300,00	4.768.000,00	
62.01.06.2010	Simpang Berambai	4.153.900,00	902.800,00	5.056.700,00	
62.01.06.2011	Sungai Hijau	4.253.700,00	924.500,00	5.178.200,00	
62.01.06.2012	Sungai Pakit	3.702.400,00	804.700,00	4.507.100,00	
62.01.06.2013	Berambai Makmur	3.415.300,00	742.300,00	4.157.600,00	
62.01.06.2014	Karang Sari	2.948.500,00	640.800,00	3.589.300,00	
62.01.06.2015	Sungai Pulau	3.408.600,00	740.800,00	4.149.400,00	
62.01.06.2016	Sungai Bengkuang	2.945.400,00	640.200,00	3.585.600,00	
62.01.06.2017	Sungai Kuning	4.078.600,00	886.500,00	4.965.100,00	
	SUB TOTAL	68.726.400,00	14.937.300,00	83.663.700,00	
	TOTAL	100.077.000,00	24.991.000,00	125.068.000,00	

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH

KODE	NAMA KECAMATAN / DESA	DEN PAJAK DAMPAK	DEN RENTAN DAMPAK	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
62.01.04.2011	Sungai Dau	2.934.000,00	637.700,00	3.571.700,00	
	SUB TOTAL	31.357.600,00	6.815.600,00	38.173.200,00	
62.01.05	KECAMATAN PANGKALAN LADA				
62.01.05.2001	Pangkalan Tiga	5.073.800,00	1.102.800,00	6.176.600,00	
62.01.05.2002	Pandu Sanjaya	10.183.600,00	2.213.400,00	12.397.000,00	
62.01.05.2003	Lada Mandala Jaya	5.548.900,00	1.206.000,00	6.754.900,00	
62.01.05.2004	Makarti Jaya	3.701.900,00	804.600,00	4.506.500,00	
62.01.05.2005	Sumber Agung	8.338.300,00	1.812.300,00	10.150.600,00	
62.01.05.2006	Purbasari	5.328.400,00	1.158.100,00	6.486.500,00	
62.01.05.2007	Sungai Rangit Jaya	4.243.500,00	922.300,00	5.165.800,00	
62.01.05.2008	Pangkalan Dewa	3.319.400,00	721.500,00	4.040.900,00	
62.01.05.2009	Kadipi Atas	3.793.200,00	824.500,00	4.617.700,00	
62.01.05.2010	Sungai Melawen	5.847.300,00	1.270.900,00	7.118.200,00	
62.01.05.2011	Pangkalan Durin	6.506.300,00	1.414.100,00	7.920.400,00	
	SUB TOTAL	61.884.600,00	13.450.500,00	75.335.100,00	
62.01.06	KECAMATAN PANGKALAN BANTENG				
62.01.06.2001	Pangkalan Banteng	4.102.300,00	891.600,00	4.993.900,00	
62.01.06.2002	Mulya Jadi	3.088.300,00	671.200,00	3.759.500,00	
62.01.06.2003	Karang Mulya	6.129.500,00	1.332.200,00	7.461.700,00	
62.01.06.2004	Kebun Agung	3.840.200,00	834.700,00	4.674.900,00	
62.01.06.2005	Sidomulyo	4.432.000,00	963.300,00	5.395.300,00	
62.01.06.2006	Marga Mulya	4.325.800,00	940.200,00	5.266.000,00	
62.01.06.2007	Amin Jaya	5.409.500,00	1.175.700,00	6.585.200,00	
62.01.06.2008	Arga Mulya	4.575.700,00	994.500,00	5.570.200,00	
62.01.06.2009	Natai Kerbau	3.916.700,00	851.300,00	4.768.000,00	
62.01.06.2010	Simpang Berambai	4.153.900,00	902.800,00	5.056.700,00	
62.01.06.2011	Sungai Hijau	4.253.700,00	924.500,00	5.178.200,00	
62.01.06.2012	Sungai Pakit	3.702.400,00	804.700,00	4.507.100,00	
62.01.06.2013	Berambai Makmur	3.415.300,00	742.300,00	4.157.600,00	
62.01.06.2014	Karang Sari	2.948.500,00	640.800,00	3.589.300,00	
62.01.06.2015	Sungai Pulau	3.408.600,00	740.800,00	4.149.400,00	
62.01.06.2016	Sungai Bengkuang	2.945.400,00	640.200,00	3.585.600,00	
62.01.06.2017	Sungai Kuning	4.078.600,00	886.500,00	4.965.100,00	
	SUB TOTAL	68.726.400,00	14.937.300,00	83.663.700,00	
	TOTAL	395.092.000,00	84.092.000,00	479.184.000,00	

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M
NIP. 19690112 199903 2 005